

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi pada masa era industri 4.0 makin berkembang pesat. Teknologi informasi yang dimulai dari penggunaan telegram dengan pesan menggunakan sandi morse hingga telepon genggam pintar. Pemanfaatan tidak hanya dilakukan untuk komunikasi namun juga dimanfaatkan untuk penyebaran informasi yang efektif dan cepat. Terkait hal ini munculah pemanfaatan data-data yang berasal dari informasi yang tersebar.

Berawal dari departemen pertahanan Amerika Serikat untuk penyebaran informasi dan jaringan local pada tahun 1969 membuat jaringan yang disebut Arpanet yang dibuat oleh proyek Lembaga Arpa (Hauben, 2010). Pada masa sekarang Arpanet bertransformasi sebagai Internet. Segala penyebaran informasi dan komunikasi sudah melalui jaringan besar yang melingkup seluruh dunia dengan penyebutan *internet of things*.

Saat ini, penggunaan internet dipergunakan secara menyeluruh untuk keseharian masyarakat secara luas. Internet jelas berpotensi mempengaruhi kapasitas masyarakat dan kelompok sosial atau politik yang kurang sumber daya untuk mendapatkan informasi dan keahlian melalui peningkatan luas cakupan informasi yang tersedia secara bebas untuk setiap pengguna internet, pada hampir semua subjek yang bisa dibayangkan (Bimber, 2000).

Internet of things telah mengubah kebiasaan manusia dalam mencari informasi dan komunikasi. Hal ini didasari oleh upaya internet mempermudah apapun yang dibutuhkan manusia. Komunikasi, berbelanja, berita, dan bahkan alat-alat sehari-hari juga tersambung melalui internet. Inovasi di *internet of things* ditandai dengan kombinasi komponen fisik dan digital untuk menciptakan produk baru dan memungkinkan model bisnis baru. Berkat manajemen daya yang semakin efisien, komunikasi broadband, memori yang andal, dan kemajuan dalam teknologi mikroprosesor, telah menjadi mungkin untuk mendigitalkan fungsi dan kapabilitas utama produk era industri (Yoo et al., 2010).

Pengguna internet di Indonesia 73,75 persen untuk kepemilikan akses internet dalam rumah tangga. Penggunaan internet juga mengalami peningkatan selama kurun waktu 2015-2019, yang ditunjukkan dari meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2015 sekitar 21,98 persen menjadi 47,69 persen pada tahun 2019 (Statistik, 2020). Semakin banyak yang melekat teknologi masyarakat Indonesia semakin cepat dalam penyampaian dan penyebaran informasi. Hal ini menyebabkan banyaknya data yang terkumpul melalui internet yang disebut *big data*.

Big Data beberapa tahun terakhir menjadi pembicaraan di masyarakat. Pada tanggal 3 April 2021 topik *big data* banyak dibicarakan di media sosial *twitter*. Banyak manfaat yang didapatkan ketika memanfaatkan *big data*. Bagi perusahaan maupun pemerintah belajar memanfaatkan *big data* akan menggunakan informasi yang langsung dari sensor, identifikasi, dan perangkat pengenalan lainnya untuk

memahami data yang lebih terperinci, untuk membuat produk dan layanan baru, dan untuk menanggapi perubahan yang dinamis (Davenport et al., 2012).

Pemanfaatan *big data* perlu adanya *data mining* yang dilakukan oleh algoritma komputer sehingga bisa mengumpulkan banyak data sekaligus. Data kemudian diolah dan dianalisis. Kemampuan untuk menganalisis *big data* memiliki nilai terbatas jika pengguna tidak dapat memahami analisisnya. Pada akhirnya, pembuat keputusan, yang dilengkapi dengan hasil analisis, harus menafsirkan hasil ini. Biasanya, ini melibatkan pemeriksaan semua asumsi yang dibuat dan menelusuri kembali analisisnya (Labrinidis & Jagadish, 2017).

Untuk pemanfaatan pemerintahan, *big data* diperlukan untuk kajian sebelum mengeluarkan kebijakan dan evaluasi kebijakan yang dilakukan. *Big data* dapat berkembang kolaborasi; menciptakan solusi waktu nyata untuk tantangan di bidang pertanian, kesehatan, transportasi, dan lainnya; dan mengantarkan era baru kebijakan dan pengambilan keputusan (Bertot & Choi, 2013). Evaluasi kebijakan juga bisa dilakukan melalui *big data*, masyarakat sudah terhubung dengan sosial media dan berkeluh kesah terhadap kebijakan. Melalui sosial media, masyarakat menulis apa yang dirasakan karena tentunya yang merasakan kebijakan adalah masyarakat. Berbagai sosial media dapat sebagai media penyalur aspirasi seperti *facebook*, *Instagram*, dan *twitter*.

Sosial media khususnya yang berbasis teks seperti *twitter* menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat. *Twitter* yang diciptakan oleh Jack Dorsey menjadi pilihan banyak masyarakat yang berkeluh kesah terhadap pemerintah. Berdasarkan

riset yang dilakukan *We Are Social* dan *Hootsuite* yang dilansir dari portal berita detikinet, pengguna *twitter* mencapai 14,05 juta dari 500 juta pengguna seluruh dunia. Hal ini menunjukkan banyak sekali data yang bisa diambil pemerintahan melalui sosial media berbasis teks ini.

Mayoritas pengguna *twitter* memanfaatkan fitur yang disebut dengan *trending topic* dan *hashtag* atau tagar. Fitur tersebut sudah mengelompokkan postingan-postingan yang sesuai topik dibicarakan. Fitur *trending topic* adalah fitur yang mengurutkan pembicaraan yang paling banyak. Fitur tagar memanfaatkan teks yang ada di postingan dengan awalan tanda pagar (#). Lingkup dari fitur *trending topic* ini bisa menjangkau global dan regional, terkadang apa yang ramai dibicarakan di dunia bisa beda pembicaraan yang ramai di suatu negara. Seperti kasus COVID-19 yang ramai dibicarakan seluruh dunia dengan berbagai tagar seperti #covid19, #coronavirus, dan #covid-19. Dilansir pada portal berita cnbc Indonesia sepanjang tahun 2020, tagar #covid19 sudah diposting sebanyak 400 juta kali secara global.

COVID-19 merupakan virus yang mulai mewabah pada desember 2019. Pemberian nama virus ini berdasarkan singkatan dari *Coronavirus Disease* dan 19 merupakan tahun dari munculnya virus ini. Kasus pertama berada di kota Wuhan provinsi Hubei negara Tiongkok dengan 425 kasus pertama yang dilaporkan (Fauci et al., 2020). Virus ini terus menyebar ke seluruh dunia hingga membuat hampir semua negara melakukan pembatasan gerak atau *social distancing* yang digerakkan secara kolektif dari WHO atau badan Kesehatan dunia.

Pandemi COVID-19 di Indonesia masih menjangkiti seluruh wilayah. Perkembangan virus yang muncul pada tahun 2019 ini menunjukkan tidak ada penurunan yang signifikan. Menurut data yang dikeluarkan oleh WHO (*World Health Organization*), per tanggal 3 Maret 2021 masih ada total 1,347,026 kasus positif dan 36,158 kasus kematian disebabkan virus COVID-19 di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa virus COVID-19 masih dalam tahap yang mengkhawatirkan di Indonesia.

Berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi dan membatasi gerak dari virus COVID-19 ini. Awal masuk virus COVID-19 di Indonesia yang diketahui dan dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020. Dilansir dari portal berita kompas.com, kasus pertama di Indonesia menjangkiti dua warga Depok, Jawa Barat. Tahap awal yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Kebijakan PSBB bagi masyarakat Indonesia juga mengandung pro, kontra dan bersikap netral. Berdasarkan analisis sentimen dari postingan melalui *twitter*, sebagian besar *tweet* di Indonesia berada pada kategori kata tidak terkategori. Kategori ini juga dapat dikatakan mencerminkan sikap netral, artinya masyarakat Indonesia tidak menunjukkan sikap mendukung atau menolak kebijakan lockdown. Hanya 32,3% masyarakat Indonesia yang menunjukkan sikap positif atau negatif terhadap kebijakan lockdown (Suratnoaji et al., 2020).

Kampanye ingat pesan ibu 3M yang dibuat pemerintah Indonesia terus diupayakan masyarakat mentaatinya. 3M merupakan singkatan dari Memakai

Masker, Menjaga Jarak Aman, dan Mencuci Tangan. Kampanye 3M berubah dan mendapat tambahan menjadi 5M yakni Memakai Masker, Menjaga Jarak Aman, Mencuci Tangan, Menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kampanye ini dibarengi dengan kebijakan pemerintah Indonesia melakukan pembatasan dari PSBB hingga PPKM mikro.

PPKM mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro) merupakan kebijakan dari pemerintah Indonesia tentang pembatasan gerak masyarakat Indonesia. Sama seperti PSBB, PPKM mikro diinisiasi oleh pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. PPKM mikro dimulai pada tanggal 9 Februari 2021. PPKM mikro sudah mendapatkan perubahan aturan yang lebih longgar dari PSBB. Pengawasan PPKM mikro dilakukan hingga level terbawah yakni RT/RW.

PPKM mikro sudah berjalan 3 jilid yang berarti sudah 3 kali aturan PPKM mikro dijalankan dengan waktu yang telah ditentukan. Sama seperti kebijakan PSBB, PPKM mikro juga banyak dukungan dan juga protes dari masyarakat Indonesia. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui media sosial *twitter*, banyak sekali yang memposting dan berkomentar terkait kebijakan PPKM mikro. Masyarakat hanya merasa PPKM mikro hanya pergantian nama namun tidak berbanding lurus dengan penanganan yang tepat untuk menanggulangi virus COVID-19 di Indonesia. Hanya saja banyak juga *tweet* yang mendukung

diberlakukan PPKM mikro untuk dijalankan sehingga terdapat gejolak pendapat pada masyarakat Indonesia.



Gambar 1.1 Tweet yang berisikan pesan memprotes kebijakan PPKM mikro



Gambar 1.2 Tweet yang mempertanyakan tentang PPKM berskala mikro

Berdasarkan fenomena ini, peneliti tertarik untuk meneliti jaringan komunikasi mengenai PPKM mikro pada saat wabah virus corona di media sosial *twitter*. Peneliti menggunakan media sosial *twitter* karena *twitter* merupakan media sosial yang berbasis teks dan memiliki fitur pencarian yang berdasarkan isu dengan menggunakan tagar, kalimat, dan kata.



Gambar 1.3 Tweet yang berisikan mendukung diberlakukan PPKM mikro



Gambar 1.4 Tweet yang berisikan keefektifan PPKM mikro

Peneliti menggunakan kata kunci “PPKM mikro” sebagai basis data pencarian di *twitter*. Pengambilan data menggunakan program *GetData Tweet* dengan basis bahasa pemrograman R. Visualisasi jaringan komunikasi menggunakan aplikasi *Gephi*. Data yang diambil dimulai dari 1 Februari 2021

hingga 3 Maret 2021 karena pada masa tersebut adalah masa dimulainya PPKM mikro hingga berjalan 3 jilid. Dengan populasi penelitian adalah semua *nodes berbahasa indonesia* yang memiliki hubungan antara kata kunci PPKM mikro. Analisis jaringan berfungsi untuk mengetahui siapa yang menjadi aktor utama dalam proses penyebaran informasi terkait PPKM mikro saat wabah virus corona masih berlangsung di Indonesia dan bagaimana hubungan yang terbentuk antar aktor serta struktur komunikasi dalam sistem pada pengguna Indonesia di media sosial *twitter*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pemetaan jaringan komunikasi yang terbentuk dalam proses penyebaran informasi terkait PPKM mikro saat wabah virus corona di media sosial *twitter*?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemetaan jaringan komunikasi yang terbentuk dalam proses penyebaran informasi terkait PPKM mikro saat wabah virus corona di media sosial *twitter*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Peneliti berharap penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran terkait jaringan yang terdapat pada media sosial dengan menggunakan suatu topik yang berkepentingan untuk masyarakat Indonesia.

- b. Peneliti berharap penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi yang menjelaskan penggunaan teori-teori komunikasi yang berkaitan dengan *new media*, komunikasi organisasi, analisis jaringan komunikasi, dan sekaligus dapat dijadikan kajian untuk bahan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses analisis jaringan komunikasi menggunakan program *GetData Tweet* dan visualisasi dengan aplikasi *Gephi*.
- b. Penelitian ini secara praktis dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas serta mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dalam melihat dan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.